

STRATEGI DIPLOMASI INDONESIA UNTUK MENDATANGKAN FOREIGN DIRECT INVESTMENT (FDI) DI TENGAH PENURUNAN KONDISI EKONOMI AKIBAT PANDEMI GLOBAL COVID-19 Periode 2019-2022

Muhammmad Alfani¹

Vivi Pusvitasary²

Denada Faraswacyen L. Gaol³

Abstract

This study aims to determine the diplomatic strategies designed by Indonesian government institutions, especially the Commercial Diplomacy strategy, to attract Foreign Direct Investment (FDI) during the decline of the COVID-19 pandemic using the perspective of Liberalism. The research period is limited to 2019-2022, which is the period of the early years of the emergence of COVID-19 and the stipulation of the pandemic until now. The analysis process uses a qualitative descriptive method with analytical tools, are the theory of Commercial Diplomacy and the concept of Investment Promotion as the basis for thinking. Analysis and finding that the diplomatic steps taken by the Indonesian government to attract FDI during the pandemic are utilizing digital platforms, promoting digital investment, holding showcases in global and local forums, conducting cross-ministerial and institutional cooperation forums, and facilitating investment for entering and feel comfortable in Indonesia. The Indonesian government used these investment promotion activities to attract Foreign Direct Investment (FDI) during the COVID-19 pandemic, primarily to invest in the State's National Strategic Projects.

Keywords: *foreign direct investment (FDI), Indonesian investment strategy, investment promotion, Pandemic COVID-19, political economy*

¹ Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Budi Luhur. Alamat Email: alfan9422@gmail.com.

² Program Studi Ilmu Hubungan Internasional. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Budi Luhur.

³ Program Studi Ilmu Hubungan Internasional. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Budi Luhur.

Pendahuluan

Pandemi COVID-19 atau *Coronavirus* sebagai sebuah fenomena baru dalam dunia internasional yang sejak kemunculannya pada 2019 lalu menyebabkan persoalan multidimensi seluruh negara di dunia. Sejak ditetapkan sebagai sebuah pandemi global oleh WHO pada tahun 2020, perekonomian global langsung mengalami penurunan pertumbuhan 3,5 persen hingga akhir 2020 menurut *International Monetary Fund* (IMF). (International Monetary Fund, 2020). Penurunan ekonomi global berdampak juga kepada arus pemberian investasi asing secara global yang pada 2020 mengalami penurunan hingga 35 persen atau hanya \$1 triliun 2020 (UNCTAD, 2021). Hal ini membuat negara-negara berkembang menerima dampak besar dari terjadinya penurunan aktivitas ekonomi secara global. Diantara negara tersebut adalah Indonesia yang mengalami penurunan ekonomi terparah sejak krisis ekonomi 1998 lalu, sejak teridentifikasinya kasus pertama COVID-19 pada Maret 2020 membuat ekonomi Indonesia langsung mengalami penurunan pertumbuhan di QII 2020 hingga minus 5,32 persen dan hingga akhir 2020 masih mengalami minus 2,07 persen secara tahunan mengakibatkan Indonesia jatuh dalam resesi ekonomi (Badan Pusat Statistik, 2020: 2).

Hal ini disadari pemerintah Indonesia bahwa perlu adanya langkah serius terkait upaya pemulihan ekonomi setelah pandemi dan hal ini dikatakan langsung oleh Presiden Joko Widodo dalam acara Rakornas bahkan Indonesia harus lebih keras lagi dalam melakukan diplomasi ekonomi terutama untuk mendatangkan *Foreign Direct Investment* (FDI) selama pandemi hal ini dikarenakan jika Indonesia hanya memanfaatkan APBN sebagai dana pemulihan ekonomi akan relatif sangat lambat (Rizky, 2021). Walaupun Indonesia pada sudah menyiapkan dana APBD besar 677,2 triliun rupiah sebagai pendanaan percepatan penanganan dan pemilihan akibat pandemi COVID-19, dengan alokasi dana berupa, pemberian bantuan sosial, sektor kesehatan, pemberian jaminan sosial, insentif pajak, dan membantu sektor industri (Pambudi, 2021: 2).

Upaya mendatangkan modal asing ini pada dasarnya sejalan dengan landasan Undang-undang Indonesia No. 78 Tahun 1967 yang menjadi regulasi pertama terkait upaya pemerintah untuk menarik investasi asing untuk meningkatkan perekonomian negara yang sampai saat ini telah mengalami reformasi regulasi hingga kini UU No. 25 Tahun 2007 dan yang paling terbaru adalah UU No. 11 Tahun 2020. Diplomasi ekonomi sendiri diartikan sebuah upaya pemerintah untuk mencapai kepentingan nasional dengan melalui cara-cara diplomatik yang dalam upaya untuk menggapai tujuan dari mempromosikan ekonomi mendatangkan investasi asing. Sebenarnya sebelum pandemi COVID-19 pemerintah Indonesia sudah melakukan berbagai upaya agar investor tertarik menanamkan modalnya, pemerintah aktif dalam forum internasional, melakukan diplomasi ekonomi, dan menciptakan kemudahan iklim investasi (Baidawi dan Zarkasi, 2019: 22) Dikuti dengan upaya perbaikan iklim investasi melalui UU Cipta Kerja atau UU No. 11 Tahun 2020 selama pandemi (Husnulwati dan Yanuarsi, 2021: 10-11). Regulasi tersebut sebagai bentuk penanganan persoalan utama pemerintah Indonesia yang dikeluhkan investor yaitu iklim investasi Indonesia yang dinilai tidak ramah terhadap investor asing dan minimnya tenaga terampil (Meilani, 2019: 5).

Langkah pemerintah Indonesia untuk mendatangkan *Foreign Direct Investment* (FDI) sudah menjadi agenda utama pemerintah Indonesia semenjak periode 2 Presiden Joko Widodo. Dari hal itu, penelitian ini mencoba menganalisis terkait bagaimana strategi pemerintah untuk mendatangkan FDI terutama selama pandemi dengan menggunakan pisau analisis teori diplomasi komersil dengan pendekatan khusus sebuah kegiatan konsep promosi investasi yang menjadi kerangka konseptual dari sebuah upaya pemerintah

selama pandemi COVID-19. Dengan metode penulisan berupa deskriptif mencoba untuk menjelaskan menggunakan narasi terkait hasil dari penelitian, disertai pendekatan penelitian secara kualitatif.

Pembahasan

Sejak kemunculannya pertama kali di Indonesia pada Maret 2020, pandemi COVID-19 menjadi krisis terparah yang pernah dialami Indonesia, membuat Indonesia harus mengalami krisis kesehatan dan krisis ekonomi nasional selama 2 tahun pandemi menyerang Indonesia. Hal ini langsung memberikan pengaruh kepada *FDI Flow* yang masuk ke Indonesia, dari laporan yang dipublikasikan oleh UNCTED bahwa penerimaan FDI pada periode 2019 - 2020 mengalami penurunan hingga 24 persen di tahun 2020 (UNCTAD, 2020). Penurunan ekonomi juga langsung dirasakan oleh Indonesia terutama selama 2020, laporan yang dipublikasikan Badan Pusat Statistika Indonesia pada Q2 2020 Pertumbuhan Domestik Bruto (PDB) turun minus 5,31 persen, hingga di akhir 2020 Q4 masih mengalami minus 2,19 persen. Dilanjutkan pada Q1 2021 yang mengalami minus 0,70 persen, walaupun setelah itu pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami bergerak statis mengarah ke tren pertumbuhan positif hingga 5 persen di Q1 2022 (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2022).

Pada tahun 2020 aktivitas perdagangan Indonesia juga mengalami penurunan signifikan. Terlihat pada bulan Mei tahun 2020 nilai ekspor Indonesia hanya menyentuh angka \$10 miliar dan nilai impor \$8 miliar angka ini bahkan terendah sejak 3 tahun, dengan nilai neraca perdagangan yang di awal tahun 2020 sudah mengalami defisit perdagangan \$-0,640 miliar dan mengalami defisit kembali pada bulan April \$-0,370 miliar (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2022). Walaupun demikian pada tahun 2020 neraca perdagangan Indonesia mengalami surplus perdagangan bahkan mengalami tren positif, tetapi untuk volume nilai ekspor dan impor menurun jika dibandingkan dengan tahun lalu. Pandemi juga membuat sektor pariwisata Indonesia selama pandemi mengalami krisis wisatawan, banyak wisatawan lokal dan asing mengurungkan niatnya untuk berwisata ke Indonesia. Hal ini terlihat dari laporan kumulatif wisatawan di tahun 2020 jumlah wisatawan yang mengunjungi Indonesia hanya total 4.052.923 juta dan jika dibandingkan dengan jumlah wisatawan pada 2019 mengalami penurunan sebesar 73,84 persen dan pada tahun 2021 turun 61,57 persen atau hanya sekitar 2.46 juta wisatawan (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2021). Dengan perkiraan kerugian yang dialami akibat penurunan wisatawan selama pandemi Indonesia khususnya untuk sektor pariwisata pada 2020 mencapai US\$ 14,7 miliar dan untuk di tahun 2021 di tiga bulan pertama kerugian sudah mencapai US\$4,3 juta (Esquivias, *dkk.*, 2021: 8).

Terjadinya penurunan ekonomi global dan berdampak kepada ekonomi Indonesia membuat pemerintah Indonesia harus merancang strategi untuk menangani dampak dan melakukan percepatan pemulihan ekonomi nasional setelah pandemi yang salah satu caranya adalah melakukan Diplomasi Ekonomi dengan melakukan promosi investasi asing untuk mendatangkan *Foreign Direct Investment* (FDI) sebagai *tools* untuk pemulihan ekonomi nasional. Hal ini didasari pemerintah Indonesia bahwa faktanya sebelum adanya pandemi. Investasi memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi ini terlihat dari laporan yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistika (BPS) Indonesia dari 2016-2019 investasi mempengaruhi sekitar 32 persen pertumbuhan PDB (Dewan Perwakilan Rakyat RI, 2021: 1). Dengan kata lain pertumbuhan ekonomi Indonesia yang memiliki rata-rata 5 persen sebelum pandemi, salah satu penyumbang persentase pertumbuhan ekonomi merupakan *Foreign Direct Investment* (FDI) selain konsumsi masyarakat atau konsumsi rumah tangga yang selama ini menjadi penopang ekonomi.

Hal ini yang menjadi alasan pemerintah Indonesia untuk mengoptimalkan diplomasi ekonomi mendatangkan investasi asing selama pandemi.

Langkah diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia selama pandemi terdiri dari beberapa upaya kegiatan mulai dari membenahan iklim investasi, memberikan intensif, dan melakukan berbagai strategi diplomasi ekonomi dengan tujuan mengoptimalkan percepatan datangnya *Foreign Direct Investment* ke Indonesia. Sesuai dengan fokus peneliti dan data yang telah didapatkan melalui beberapa *platform* pelayanan dan informasi publik yang dipublikasikan oleh beberapa Kementerian yang menaungi persoalan strategi investasi Indonesia selama pandemi. Peneliti mendapatkan beberapa langkah upaya pemerintah terkait upaya mendatangkan penanaman modal asing dan peneliti mencoba mengelaborasi dengan teori konsep penelitian yang telah dirancang dalam kerangka penelitian. Hasil dari analisis dan identifikasi data terkait strategi diplomasi komersil khususnya promosi investasi pemerintah Indonesia disajikan dalam 4 kegiatan utama yaitu *Image Branding*, *Investment Generation*, *Investment Facilitation*, dan *Policy Advocacy* dengan kegiatan dibagi sesuai kegiatan lembaga pemerintah Indonesia, yang disajikan sebagai berikut:

Image Branding (Iklan, Situs Web, Brosur, dan Public Relation)

Kementerian Investasi RI/BKPM

1. Menerapkan implementasi strategi Digitalisasi Promosi Investasi dengan menggunakan *Promotion Tools*, seperti media sosial khusus investor asing untuk mempermudah mengakses informasi terkait perkembangan investasi. Menggunakan TVC (*Television Commercial*) BKPM yang bekerja sama dengan media internasional *Bloomberg* dan *CNBC* sebagai media penyebaran promosi. Publikasi kajian online seperti forum dan webinar melalui *platform digital* Youtube BKPM (Kementerian Investasi RI/BKPM, 2019).
2. Mengalihkan metode promosi investasi yang sebelumnya *wait and see* dengan metode lebih komparatif *see and be seen* dengan mencoba untuk terlihat oleh investor.

Kementerian Luar Negeri RI

1. Upaya Diplomasi Publik kondisi ekonomi Indonesia yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dalam forum diantaranya KTT G-20 dan Sidang Umum PBB ke-75 2020 (Kementerian Luar Negeri RI, 2020: 71).
2. Membuat *Promotion Tools* diplomasi digital platform untuk memudahkan stakeholder mengakses data, kegiatan promosi, dan membangun citra positif melalui Kemlu Tv, *Digital Command Cente (DCC)*, *Journalist Visit Program (JVP DN)*, media sosial (Kementerian Luar Negeri RI, 2020: 61).

Investment Generation (Identifikasi target, menghubungi langsung, forum, seminar, dan sebagainya)

Kementerian Investasi RI/BKPM

1. Memanfaatkan *tools webex teleconference* dan zoom untuk mengkoordinasikan promosi investasi dan bertemu dengan investor secara virtual (Kementerian Investasi RI/BKPM, 2019).
2. Melakukan strategi *rescheduling* dengan beberapa investor selama pandemi (CNBC Indonesia, 2021).
3. Melakukan *extra service* oleh *Indonesia Investment Promotion Center (IIPC)* dengan menanyakan kendala investasi, memberikan informasi, melayani kebutuhan kapan pun dibutuhkan, dan sebagai pelaksana promosi investasi secara online dan offline (CNN Indonesia, 2021).

4. Mengadakan *Masterclass Promosi Investasi Daerah* di setiap tahunnya, untuk meningkatkan iklim dan promosi investasi pemerintah daerah (Kementerian Investasi RI/BKPM, 2019).
5. Membuat klasifikasi identifikasi target investor strategis dalam tiga kelas perusahaan yang optimis melakukan relokasi, perusahaan memiliki intensi relokasi, ketiga perusahaan potensi relokasi (Yuliot, 2020).
6. Membentuk Tim Promosi Terpadu (TPT), dengan melakukan promosi bersifat *end-to-end, pro active* mengadakan pertemuan, melakukan *matchmaking* realisasi rencana investasi (Kementerian investasi RI/BKPM, 2019: 65).
7. Melakukan *Image Branding dan Trust Investing* dengan investor strategis pada WEF Davos 2020 dengan mengadakan *Indonesia Pavilion: B20 Indonesia Business and Investment Forum Davos, Swiss* sebagai *Indonesia Business Showcase* dengan melakukan *promoting investment, Improving Local Business & Product, Business Matchmaking, And Industry Showcasing* (Kandani, 2022). Sektor potensial energi, SWF *Indonesia Investment Authority*, dan potensial *business partner*. (Wirjoatmodjo, 2020).
8. Mengadakan *Pavilion Indonesia Night* melakukan promosi potensi budaya dan ekonomi Indonesia Timur dalam *Indonesia Pavilion 2022*, mendorong Investasi strategis di bidang mineral (Lahadalia, 2022).
9. Mengadakan *Forum Group Discussion* (FGD) mendorong *sustainable investment* produk ETM (*Energy Transition Mechanism*) pada forum G20 2022 (Maryanto, 2022).
10. Melakukan kerja sama ekonomi internasional, *Bilateral Investment Treaty (BIT), Free Trade Agreement (FTA), Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA), Bilateral Investment Agreement (BIA), Working Group III Investor-State Dispute Settlement Reform (UNCITRAL)*, dan RCEP, mencakup proteksi, promosi, fasilitasi, dan liberalisasi bagi investor (Kementerian Investasi RI/BKPM, 2019: 64).
11. Ikut serta Forum Kerja sama Bidang Penanaman Modal di tahun 2019 seperti, *Bilateral Joint Commission on Trade and Investment (JCTI) Meeting, Working Group on Investment, Trade and Investment Working G20, ASEAN Economic Ministry-ASEAN Investment Council*, dan *Committee on Investment ASEAN* (Kementerian Investasi RI/BKPM, 2019: 65).

Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi Indonesia

1. Mengadakan *Virtual Press conference Bali Investment Forum 2021*. Bersama *Ambassador Investment* negara mitra strategis investasi (Belanda, Australia, Canada, dan Russian) (Kemenko Bidang kemaritiman dan Investasi RI, 2021).
2. Mempromosikan ekonomi hijau dan *Green Investment* dalam *Conference of the Parties COP-26 2021 UNFCCC* di Glasgow, Skotlandia (Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi RI, 2021: 39).
3. KTT G20 Summit Bali sebagai *showcase* potensi ekonomi pariwisata Indonesia (Kemenko Marves RI, 2021).
4. *Bilateral Maritime Forum (BMF)* dan *Bilateral Maritime Dialogue (BDM)* promosi proyek strategis ekonomi hijau, ekonomi digital, dan sektor pelabuhan (Kemenko Marves RI, 2021: 10).
5. Ikut serta dalam *High Level Meeting of the Archipelagic and Island States Forum/HLMAIS Forum Start Up Business Summit 2020* dan *High Level Panel for a Sustainable Ocean Economy (HLP SOE)* dan *GloLitter Partnerships Project* promosi program *Sustainable Ocean Plans* (Kemenko Marves RI, 2021: 12).
6. *Showcase* potensi pembangunan layanan pelabuhan *Vessel Traffic Service (VTS)* dalam IMO (*International Maritime Organization*) pada sidang ke-75 MEPC 2019 (*Marine Environment Protection Commitee*) di London (Kemenko Marves RI, 2019: 19).

Kementerian Luar Negeri Indonesia

1. Menggunakan teknik *Structural Approach Diplomacy* dengan melakukan *private approach* pendekatan kemanusiaan atau perilaku kepada sasaran investor dalam bentuk roadshow (Sulistiyanto, 2022).
2. Melakukan *showcase* Promosi Ekonomi Indonesia dalam forum internasional KTT G-20, COP26, dan sidang PBB ke-76 di tahun 2021 (Kementerian Luar Negeri RI, 2021: 48).
3. Promosi Potensi Daerah melalui *Update From The Region* (UFTR) terutama untuk nilai ekonomi yang dimiliki daerah (Kementerian Luar Negeri RI, 2019: 44).
4. Melaksanakan *Investment Briefing on Indonesia's National Strategic Project 2020* berkerjasama dengan *International Development Finance Corporation (DFC)*, *US Chamber of Commerce*, *US-ASEAN Business Council*, dan *The Business Council for International Understanding (BCIU)* (Kementerian Luar Negeri RI, 2020: 50).
5. Melakukan *Focus Group Discussion* dan webinar series MoFA, We-Talkshow mengenai diseminasi ekonomi dan pembangunan untuk Indonesia timur (Kementerian Luar Negeri RI, 2021: 48).

Investment Facilitation (Memberi informasi, membantu persetujuan, bantuan dengan situs, utilitas)

Kementerian investasi RI/BKPM

1. Menggunakan *website* www.investindonesia.go.id dan www.jdih.bkpm.go.id dan *mobile app* BIM BKPM, OSS Scanner BKPM, OSS 1.1 BKPM, dan JDIH BKPM, sebagai pintu utama pelayanan investor, publikasi brosur kajian investasi, dan akses iklim investasi terutama kepada investor asing (CNN Indonesia, 2021).
2. Membangun kemitraan antara publik dan swasta untuk mendorong *Green Investment*, kemudahan kebijakan, dan melakukan *sharing knowledge* (Rasjid, 2022).

Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi Indonesia

1. Menangani persoalan *Debottlenecking Investment* (Kemenko Marves RI, 2021: 56).
2. Mengeluarkan kebijakan Proyek Kerja sama Investasi Pemerintah dan Badan Usaha terkait investasi Kereta Cepat Jakarta-Bandung dan Jakarta-Semarang melalui Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 dan mempercepat pembangunan Tol Cisumdawu dan Tol Trans Sumatera untuk menangani hambatan kebebasan tanah (Kemenko Marves RI, 2020: 49)

Kementerian Perhubungan Indonesia

Menyelesaikan Proyek Strategis Nasional (PSN) terutama proyek infrastruktur fasilitas investasi Indonesia, seperti membangun dan mengoptimalkan tol laut yang kini sudah 32 rute subsidi jalur pengiriman barang ke wilayah terpencil Indonesia (Direktorat Jendral Perhubungan Laut, 2020). Membangun pelabuhan penyebrangan barang baru di wilayah timur dan 10 bandara untuk wilayah PTTTP (pinggiran, terluar, terpencil dan perbatasan) di tahun 2021 (Kementerian Perhubungan RI, 2021). Pada tahun 2020 membangun 12 Pelabuhan Penyebrangan di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dan 8 bandara udara (Kementerian Perhubungan RI, 2020).

Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat)

Telah membangun Infrastruktur 61 ruas jalan Tol yang sudah beroperasi dengan 30 ruas masih dalam pembangunan dan melakukan perpanjangan Jalan Nasional hingga 548 ribu Kilometer sampai tahun 2021 (Kementerian PUPR RI, 2021: 50). Telah membangun 19.133 Unit Jembatan Nasional dan 201 Jembatan Gantung (Kementerian PUPR RI, 2021: 54).

Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Indonesia

Membuat 19 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan hingga 2021 KEK sudah berhasil menarik realisasi investasi asing sebanyak 76 triliun (Dewan Nasional KEK RI, 2021: 10-19).

Policy Advocacy (Survei, ikut serta dalam penugasan, membuat proposal kebijakan, melakukan Lobby)

Kementerian investasi RI/BKPM

1. Membantu investor yang mengalami mangkrak dan hampir 63 persen yang telah dibantu dan terealisasi (CNBC Indonesia, 2021).
2. Membuat Peta Potensial Penanaman Modal Sektor Prioritas untuk para stakeholder, berisi kajian sektoral, skema kerjasama, perkiraan modal investasi, peluang investasi, lokasi strategis, dan bidang industri potensial (Kementerian Investasi RI/BKPM, 2019).
3. Mengesahkan Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun 2020) sebagai reformasi iklim investasi dan memperbaiki *Ease of Doing Business Country* Indonesia menjadi 73 di tahun 2020 (CNN Indonesia, 2021).
4. Membentuk Satgas *marketing intelligent* khusus perusahaan yang akan hengkang dari Tiongkok dengan meriset fasilitas yang diberikan negara pesaing (Kementerian Investasi RI/BKPM, 2021).

Menteri Keuangan RI

1. Memberikan (UU No. 2 Tahun 2020) dengan memberikan penurunan tarif pajak badan hingga 22-20 persen dan 19-17 persen di tahun 2022 untuk perusahaan yang melakukan *go public*.
2. Membuat dan menawarkan beberapa paket stimulus ekonomi bagi pemodal asing yang diantaranya, *Supertax Deduction* kepada industri yang melakukan kegiatan vokasi, pengembangan, penelitian tertera dalam No. 128/PMK.10/2019 (Kementerian Keuangan RI, 2019). *Supertax Deduction* untuk Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Tertentu terutama yang berkaitan dengan teknologi di Indonesia, tertera dalam No. 153 /PMK.010/2020. (Kementerian Keuangan RI, 2019). *Tax Holiday* kepada investor yang melakukan investasi pada sektor industri pionir, tertulis pada No. 130 /PMK.010/2020 (Indonesia, 2020). *Tax Allowance* memberikan pengurangan Penghasilan Kena Pajak (PKP) untuk bidang tertentu dan daerah tertentu tertera pada PP No. 78 Tahun 2019 yang telah mengalami perubahan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 96/PMK/0.10/2020 (Indonesia, 2019).

Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi Indonesia

1. Menetapkan kebijakan untuk mendorong investasi sektor EBT (Energi Baru Terbarukan), Penyusun Rancangan Peraturan Presiden tentang Listrik Terbarukan oleh PT PLN, Revisi PERMEN ESDM No. 49 Tahun 2018 mengenai Pembangkit Listrik tenaga Surya Atas PT PLN, pembentukan Kelompok Kerja Percepatan Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (Pokja BJPSDA), dan Penyusun rancangan peraturan pemerintah Tentang Pengelolaan SDA (RPP PSDA). Menetapkan kebijakan Program Kendaraan bermotor Listrik Berbasis Baterai atau KBL BB (*Battery Electric Vehicle*), melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 tahun 2019, beberapa Peraturan Turunan 2020, dan Kebijakan Tingkat Pusat 2021 (Kemenko Marves RI, 2021).
2. Menetapkan kebijakan strategis Perancangan dan Pengembangan Hilirisasi Mineral dan Batu Bara Perpres 109 Tahun 2020 terkait penambahan Proyek Strategis Nasional (PSN) (Indonesia, 2020).

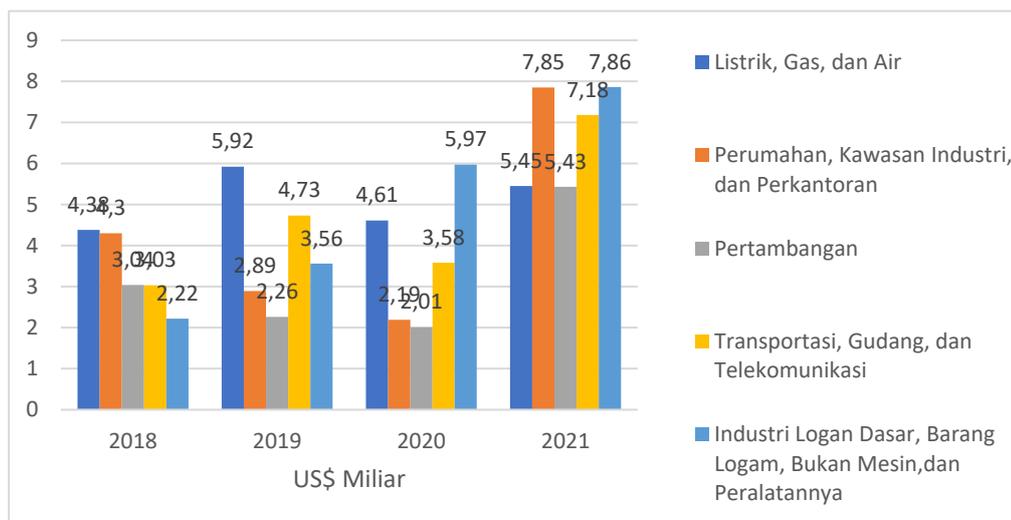
Badan Pemeriksa Keuangan Indonesia

Mengesahkan Perpres No. 77 Tahun 2019, mengenai *Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and Profit Shifting* atau penghapusan pajak berganda yang sampai saat ini pada tahun 2022 Indonesia telah menjalin kerja sama dengan 93 negara di dunia.

Dari keseluruhan upaya kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia terkait promosi investasi selama pandemi, bahwa yang menjadi fokus upaya pemerintah mengadakan kegiatan *showcase* promosi investasi dalam forum internasional yang salah satunya adalah dalam WEF (*World Economic Forum*) Davos, Swiss, di tahun 2019 - 2022. Penulis menganalisis bahwa dalam forum ini pemerintah Indonesia melakukan sebuah panel khusus bernama Indonesia Pavilion B20 *Economic and Investment Forum* dalam *World Economic Forum* (WEF) Davos. Dalam panel tersebut pemerintah Indonesia pemaparan beberapa poin promosi investasi yang menjadi daya jual Indonesia kepada negara-negara yang mengikuti WEF, di antaranya:

1. *Various Fiscal Incentives*
Dengan memaparkan insentif yang akan diberikan oleh pemerintah seperti *Tax Holiday*, *Tax Allowance*, Pembebasan bea untuk kategori tertentu, dan *Tax Facility for R&D and Vokasi*.
2. *EODB (Ease of Doing Business) Facilities*
Dengan mempromosikan reformasi kemudahan bisnis OSS BKPM, *Green Lane* untuk investasi padat modal, memaparkan *additional facilities for economic zones* (19 KEK, 4 *Free Trade Zones* (Sabang, Bintan, Batam, Karimun) dan 10 *New Bali Tourism*.
3. *Business Opportunity*
Mempromosikan bisnis sektor prioritas Indonesia saat ini, seperti *Ecotourism*, *Renewable Energy*, *Blue Economy*, *New Development*. (Rasjid, 2022).

Menurut Kepala BKPM/Kementerian Investasi terdapat 3 sektor utama yang menjadi fokus promosi pemerintah (1) Sektor Hirilisasi Sumber Daya Alam, (2) Ekonomi Hijau, (3) Ekonomi Digital, terutama pada sektor industri padat karya (Lahadalia, 2022). Dari salah satu *Showcase* dan fokus sektor penarikan investasi tersebut, telah memberikan dampak besar kepada investasi yang masuk ke Indonesia terutama untuk sektor-sektor prioritas yang mengalami perubahan realisasi investasinya pada masa pandemi COVID-19 dan sebelum pandemi.



Grafik 1. Tren Sektor FDI menurut Sektor Industrinya

Sumber: Kementerian Investasi RI/BKPM dan telah di olah oleh penulis (2018-2021)

Dari analisis Grafik 1. membuktikan bahwa langkah yang dilakukan pemerintah Indonesia terutama untuk melakukan promosi investasi khususnya pada sektor industri yang memiliki nilai jual Indonesia secara internasional terutama untuk sektor industri prioritas seperti manufaktur, pertambangan, teknologi, dan *real estate* selama pandemi. Yang mengalami peningkatan realisasi investasi sebelum dan selama pandemi. Ini juga menjadi bukti positif bahwa langkah strategi pemerintah dan realisasi investasi asing pada sektor tersebut sudah sesuai bahkan melebihi target. Strategi ini akan terus menjadi langkah utama pemerintah Indonesia untuk menarik *Foreign Direct Investment* (FDI) hingga masa periode dari Presiden Joko Widodo berakhir hingga 2024 mendatang.

Kesimpulan

Pada kenyataannya antara *Foreign Direct Investment* (FDI) dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia memiliki sifat positif yaitu dengan masuknya modal asing akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia di setiap tahunnya dan hal ini dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk menangani persoalan penurunan ekonomi selama pandemi COVID-19. Membuktikan juga bahwa Indonesia sebagai salah satu negara berkembang di dunia masih sangat membutuhkan Penanaman Modal Asing (PMA) untuk dapat mengolah Sumber Daya Alam (SDA) yang dimilikinya terutama pada sektor industri komoditas yang masih memerlukan pengembangan produk agar memiliki nilai jual tinggi dalam pasar internasional. Keberhasilan Indonesia pada masa Presiden Joko Widodo dalam membangun fasilitasi investasi terutama dalam hal pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, tol Laut, pelabuhan, jembatan, dan sarana investasi lainnya merupakan sebuah rangkaian strategi pemerintah untuk dapat mendatangkan investasi melalui pembenahan fasilitasi.

Didukung dengan masuknya Indonesia dalam forum internasional G20 dan menjadi negara pertama di kawasan ASEAN yang dipercaya menjadi pelaksana Presidensi G20, membuktikan bahwa Indonesia adalah negara yang diperhitungkan dalam hal pertumbuhan dan potensi ekonominya secara global. Upaya reformasi besar-besaran terkait regulasi iklim investasi Indonesia melalui UU 11 Tahun 2020 Cipta Kerja, pelayanan

berusaha berbasis online melalui OSS (*Online Single Submission*) 1.1 Kementerian Investasi, pemberian insentif penanaman modal asing, pandemi disertai dengan fakta Index EODB Indonesia yang menempati peringkat 73 hal menjadi daya jual yang dimiliki Indonesia.

Keuntungan dan daya saing tersebut dimanfaatkan pemerintah Indonesia sebagai poin pelaksanaan kegiatan promosi investasi yang dibuat dalam beberapa rangkaian kegiatan terstruktur dan terencana sebagai bentuk strategi pemerintah Indonesia mendatangkan investor asing khususnya selama pandemi COVID-19. Rangkaian kegiatan dibuat dalam bentuk kerangka strategi investasi pemerintah Indonesia yang memiliki ranah kegiatan *Image Branding*, *Investment Generation*, *Investment Facilitation*, dan *Policy Advocacy*, yang keseluruhan dirancang dalam bentuk kegiatan utama promosi investasi yaitu *showcase* atau panel dalam panel forum internasional dengan menyampaikannya secara langsung kepada investor asing peluang dan potensi Indonesia saat ini. Kegiatan tersebut dikemas menggunakan metode *Structural Approach Diplomacy* dengan melewati rangkaian kegiatan pendekatan kepada para calon investor jauh sebelum adanya kesepakatan investasi antara kedua negara demi terciptanya *relations approach* yang baik.

Dari analisis keseluruhan rangkaian kegiatan promosi investasi asing yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia menemukan fakta bahwa strategi promosi investasi Indonesia cenderung memiliki pola yang saling berhubungan dan memiliki mempengaruhi besar pada masing-masing kegiatan membentuk *politics chain* yang dikemas dalam proses diplomasi yang terstruktur dengan tujuan untuk membangun *network business* dan terciptanya negosiasi strategis antar investor asing. Sekaligus membuktikan bahwa di mata global Indonesia saat ini menjadi negara yang dapat dikatakan sangat layak untuk menjadi pilihan lokasi utama investor untuk menanamkan modalnya.

Harapannya dengan adanya UU No. 11 Tahun 2020 atau UU Cipta Kerja, pemerintah Indonesia harus membuktikan bahwa persoalan hambatan investasi di Indonesia sudah lebih baik dan pelaksanaannya sesuai dengan yang tercantumkan dalam Undang-undang. Terutama dalam hal tata kelola sarana fasilitasi investasi yang harus dioptimalkan pemanfaatannya dengan baik karena persoalan sarana menjadi hambatan besar selama ini. Pemerintah Indonesia juga harus memastikan bahwa tidak ada lagi persoalan kebijakan yang mengalami *overlapping* antara pemerintah daerah dan pusat dengan tujuan agar investor merasa percaya bahwa iklim investasi Indonesia sudah melewati sinkronisasi keputusan nasional.

Referensi

- Badan Pusat Statistik Indonesia. (2022). Ekspor dan Impor. <https://www.bps.go.id/exim/> diakses pada 15 Juni 2022.
- Badan Pusat Statistik Indonesia. (2021). Kunjungan Wisatawan Mancanegara per bulan Menurut Kebangsaan (Kunjungan), 2021. <https://www.bps.go.id/indicator/16/1470/2/kunjungan-wisatawan-mancanegara-per-bulan-menurut-kebangsaan.html>. diakses pada 15 Juni 2022.
- Baidawi, Ahmad dan Zarkasi, A. (2019). Pemasaran Politik Luar Negeri Sebagai Diplomasi Presiden Jokowi Untuk Menarik Investor Asing. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Volume 04 Nomor.
- Badan Pusat Statistik Indonesia. (2022). [Seri 2010] Laju Pertumbuhan PDB Seri 2010 (Persen), 2022. <https://www.bps.go.id/indicator/11/104/1/-seri-2010-laju-pertumbuhan-pdb-seri-2010.html>, diakses pada 15 Juni 2022.
- Badan Pusat Statistik. (2020). Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan II-2020. No. 64/08/Th. XXIII.

- Dewan Perwakilan Rakyat RI. (2021). Perkembangan PMDN dan PMA di Indonesia Tahun 2016-2020.
- Directorat Jendral Perhubungan Laut. (2020). Program Tol Laut Mendukung Distribusi Hasil Perikanan 2020.
- Dewan Nasional KEK RI. (2021). Laporan Perkembangan Kawasan Ekonomi Khusus 2021.
- Esquivias, M. A., Sugiharti, L., Rohmawati, H., & Sethi, N. (2021). Impacts and implications OF a pandemic on tourism demand in Indonesia, *Economics and Sociology*, 14(4). *Economic Update: Strategi Promosi Tarik Investasi di Tengah Pandemi*, (22 Juli 2021). Program Televisi. Jakarta: CNBC Indonesia.
- Economic Update: Strategi Promosi Tarik Investasi di Tengah Pandemi*. (22 Juli 2021). Program Televisi, Jakarta: CNBC Indonesia.
- FMB 9: Strategi Indonesia Menggaet Investor*. (14 Juni 2021). Program Televisi. Jakarta: CNN Indonesia.
- Husnulwati, Sri dan Yanuarsy, Susi. (2021). Kebijakan Investasi Masa Pademi Covid-19 Di Indonesia. Volume 19 Nomor 2.
- Investasi Indonesia: Episode 3: Masterclass Promosi*. (26 November 2019). Podcast BKPM, Jakarta: Kementerian Investasi RI/BKPM.
- Investasi Indonesia: Episode 4: Digitalisasi Promosi*. (6 Desember 2019). Podcast BKPM, Jakarta: Kementerian Investasi RI/BKPM.
- International Monetary Fund. (2020). Policy Support and Vaccines Expected to Lift Activity, World Economic Outlook Update QII.
- Indonesia. (2019). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2019.
- Indonesia. (2020). Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan No. 130 /PMK.010/2020.
- Indonesia, (2020), Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
- Kementerian Luar Negeri RI. (2020). Laporan Kinerja Direktorat jenderal informasi dan Diplomasi Publik 2020.
- Kementerian investasi RI/BKPM. (2019). Laporan Kinerja 2019.
- Kementerian Investasi RI/BKPM. (2019). Laporan Kinerja 2019.
- Kemenko Bidang kemaritiman dan Investasi RI. (2021). Paparan Bapak Menko Luhut terkait perkembangan pemulihan ekonomi di Bali, *Virtual Press Conference Investment Forum Rethinking and Reinventing Bali Post Covid-19*, <https://www.youtube.com/watch?v=zBfnNZolVgI>. diakses pada 01 Juli 2022.
- Kemenko Bidang kemaritiman dan Investasi RI. (2021). Laporan Kinerja 2021.
- Kemenko Marves RI. (2021). Pelaksanaan KTT G20 Jadi Showcase Tunjukkan Potensi Terbaik Indonesia," <https://maritim.go.id/pelaksanaan-ktt-g20-jadi-showcase-tunjukkan-potensi-terbaik/>. diakses pada 02 Juli 2022.
- Kemenko Marves RI. (2021). Laporan Tahunan 2021.
- Kemenko Marves RI. (2019). Laporan Tahunan 2019.
- Kementerian Luar Negeri RI. (2021). Laporan Kinerja Direktorat jenderal informasi dan Diplomasi Publik 2021.
- Kementerian Luar Negeri RI. (2019). Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik 2019.
- Kemenko Marves RI. (2021). Laporan Kinerja Tahun 2021.
- Kemenko Marves RI. (2020). Laporan Tahunan 2020.
- Kementerian Perhubungan RI. (27 Desember 2021). Catatan Kinerja Kementerian Perhubungan Tahun 2021, <https://dephub.go.id/post/read/catatan-kinerja-kementerian-perhubungan-tahun-2021>. diakses pada 05 Agustus 2022
- Kementerian Perhubungan RI. (19 November 2020), Capaian Kementerian Perhubungan di Tahun 2020. <http://dephub.go.id/post/read/capaian-kementerian-perhubungan-di-tahun-2020?language=id>. diakses pada 05 Agustus 2022.
- Kementerian PUPR RI. (2021). Informasi Statistik Infrastruktur PUPR 2021.
- Kementerian Investasi RI/BKPM. (2021). Strategi BKPM Pulihkan Investasi di 2021.
- Kementerian Keuangan RI. (2019). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 128 /PMK.010/2019.
- Kementerian Keuangan RI. (2019). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 153 /PMK.010/2020.

Strategi Diplomasi Indonesia untuk Mendatangkan Foreign Direct Investment (FDI) di Tengah Penurunan Kondisi Ekonomi Akibat Pandemi Global COVID-19 (2019 - 2022)

- Kandani, Shinta W. (23 Mei 2022). Paparan Indonesia Pavilion Indonesia Chair pada pembukaan Indonesia Pavilion, Swiss. <https://www.youtube.com/watch?v=cypXV5fqs6g>. diakses pada 02 Juni 2022.
- Kemenko Marves RI. (2021), Laporan Tahunan 2021.
- Lahadalia, Bahlil. (20 Juli 2022). Paparan Kepala Kementerian Investasi Ri/BKPM dalam Konferensi Pers Realisasi Investasi Triwulan II Tahun 2022. <https://www.youtube.com/watch?v=Vojk4uf11V8&t=3777s>. diakses pada 07 Agustus 2022.
- Lahadalia, Bahlil. (24 Mei 2022). Pemaparan Materi Meteri Investasi/BKPM RI terkait *showcase* dan agenda Indonesia dalam *Indonesia Pavilion*. <https://www.youtube.com/watch?v=AoC2xcPfo5E>. diakses pada 03 Juni 2022.
- Maryanto, Joko Tri. (14 April 2022). Paparan Badan Kebijakan Fiskal mengenai peta sustainable Investment global 2022 G20. <https://www.youtube.com/watch?v=uRf8hkB9ceU>. diakses pada 02 Juli 2022.
- Meilani, Hilma. (2019). Hambatan Dalam Meningkatkan Investasi Asing di Indonesia dan Solusinya. Vol. XI, No.19/I/Puslit.
- Pambudi, Aloysius Anandyo. (2021). Strategi Diplomasi Ekonomi Indonesia Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19. Jurnal Dinamika Global Vol. 6 No. 1.
- Rizky, Fahreza. (2021). Jokowi Sebut Investasi jadi Jangkar Pemulihan Ekonomi Saat Pandemi. <https://www.idxchannel.com/economics/jokowi-sebut-investasi-jadi-jangkar-pemulihan-ekonomi-saat-pandemi>.
- Rasjid, Arsjad. (18 Mei 2022). Pemaparan Ketua Umum KADIN Indonesia dalam Pembukaan Road to G20 Investment Forum terkait investasi berkelanjutan. <https://www.youtube.com/watch?v=Ghgxg8VUIUY>. diakses pada 02 Juli 2022.
- Rasjid, Arsjad. (20 Mey 2022). Pemaparan ketua Kadin Indonesia dalam forum Indonesia Pavilion 2021. <https://www.youtube.com/watch?v=cypXV5fqs6g&t=1153s>. diakses pada 07 Agustus 2022.
- Sulistiyanto, Gandi. (1 Agustus 2022). Pemaparan Dubes RI Untuk Korea Selatan dalam acara Power Lunch,CNBC Indonesia. https://www.youtube.com/watch?v=h3usY4_GKdc. diakses pada 3 Agustus 2022.
- UNCTAD. (2021). World Investment Report 2021.
- UNCTAD. (2020). World Investment Report 2020.
- Wirjoatmodjo, Kartika. (24 Mei 2020). Paparan Wakil Menteri BUMN dalam pembukaan Indonesia Pavilion, Bali. <https://www.youtube.com/watch?v=jwZCbzmOqgA>. diakses pada 02 Juli 2022.
- Yuliot. (9 Desember 2020). Paparan Materi Kepala Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Strategi Menarik Investasi Asing sektor Industri Saat Pandemi Covid-19. <https://www.youtube.com/watch?v=OoWrV4bVco4>. diakses 29 Juni 2022.